

**UPAYA JEPANG MENGADAPTASI REZIM INTERNATIONAL
WHALING COMMISSION (IWC) DALAM MELAKSANAKAN
PERBURUAN PAUS PADA TAHUN 1986-2018**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



NADRATUR RAHMI

1610853003

**Pembimbing I: Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc. Sc,
Pembimbing II: Silvi Cory, S.Pd, M.Si**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus dari tahun 1986 hingga tahun 2018. Jepang sebagai negara yang melakukan perburuan paus komersial harus dihadapkan dengan kebijakan IWC berupa *commercial whaling moratorium* yang melarang penangkapan paus untuk tujuan komersial. Hal ini tentu bertentangan dengan kepentingan Jepang, sehingga Jepang menolak moratorium tersebut. Namun pada tahun 1986 Jepang akhirnya memutuskan untuk mengadaptasi dan meratifikasi moratorium setelah mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat. Jepang mengambil beberapa kebijakan dalam perburuan pausnya dengan tetap mengadaptasi rezim IWC. Beberapa upaya Jepang tersebut diantaranya, pertama penghentian aktivitas perburuan paus komersial dan diikuti dengan kebijakan Jepang melakukan program *scientific whaling* melalui *special permit*. Kedua, Jepang berupaya melobi IWC agar mencabut moratorium setelah mendapatkan data mengenai kelimpahan beberapa spesies paus. Dan ketiga, Jepang berupaya untuk mendapatkan hak *aboriginal subsistence whaling* untuk empat masyarakat pesisirnya, karena menurut Jepang kegiatan perburuan paus oleh masyarakat pesisirnya merupakan bentuk dari pelestarian budaya *gyoshoku bunka* serta untuk memenuhi kebutuhan pangan ekonomi masyarakat pesisir dan bukan untuk tujuan komersial. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep *Internasional norm dynamics and political change* oleh Marta Finnemore dan Sikkink, dan juga menggunakan teori *Compliance, effectiveness and behavior change in international environmental law* oleh Ronald B. Mitchell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.

Kata Kunci: Jepang, *International Whaling Commission (IWC)*, *Scientific Whaling*, Rezim Internasional, Perburuan paus



ABSTRACT

This study aims to analyze Japan's efforts to adapt the IWC regime in carrying out whaling from 1986 to 2018. Japan as a country that conducts commercial whaling must be faced with the IWC's policy in the form of a commercial whaling moratorium which prohibits whaling for commercial. This is certainly against the interests of Japan, so that Japan rejects the moratorium. However, in 1986 Japan finally decided to adapt and ratify the moratorium after getting pressure from the United States. Japan took several policies in its whaling while still adapting the IWC regime. Some of Japan's efforts include firstly, stopping commercial whaling activities and followed by Japan's policy of conducting a scientific whaling program through a special permit. Second, Japan is trying to lobby the IWC to lift the moratorium after obtaining data on the abundance of several whale species. And third, Japan seeks to obtain subsistence aboriginal whaling rights for its four coastal communities, because according to Japan whaling activities by coastal communities are a form of preserving the gyoshoku bunka culture and to meet the economic and food needs of coastal communities and not for commercial purposes. This study uses the framework of the concept of international norm dynamics and political change by Marta Finnemore and Sikkink, and also uses the theory of compliance, effectiveness and behavior change in international environmental law by Ronald B. Mitchell. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis type of research.

Keywords: *Japan, International Whaling Commission (IWC), Scientific Whaling, International Regime, Whaling*

